

## Menggapai Asa Membentuk Kota Pada Masyarakat Adat di Wini di Perbatasan Negara Indonesia – Timor Leste

Eni Sugiarti\*

### ABSTRAK

*Percepatan pembangunan lingkungan baru perkotaan di perbatasan negara Indonesia-Timor Leste menjadi peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat adat. Kebijakan pengembangan perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus berimbang bagi pengembangan wilayah menjadi pusat aktifitas strategis di perbatasan negara. Di wilayah NTT pengembangan kawasan bukan tanpa kendala. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif penelitian mengkaji timbulnya permasalahan pada masyarakat adat dalam kehidupan perkotaan baru. Proses adaptasi menjadi kejadian alamiah yang dilakukan oleh masyarakat ketika dihadapkan pada lingkungan baru. Namun dalam prakteknya terjadi adanya perbedaan-perbedaan signifikan yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan perencanaan-perencanaan dan strategi-strategi tertentu untuk beradaptasi.*

**Kata Kunci:** Kawasan Strategis, Perbatasan Negara, Strategi Adaptasi.

### PENDAHULUAN

Agenda pemerintah tentang pengembangan kawasan terluar negara sudah terdengar sejak tahun 2008, namun dalam pelaksanaannya terkesan lambat. Dikeluarkannya RPJM 2010-2014 dalam pelaksanaannya mampu merubah wajah wilayah perbatasan menjadi kawasan yang memiliki dinamika yang berarti baik dalam makna ruang maupun masyarakatnya. Imej tentang masyarakat tertinggal, kemiskinan dan wilayah terbelakang masih melekat erat di kawasan perbatasan. Di wilayah NTT masyarakat di perbatasan tumbuh dalam kultur sosial budaya masyarakat adat yang masih terikat kuat pada aturan aturan tradisi. Memasuki akhir tahun 2014 pemerintah melakukan terobosan yang besar dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan dengan melakukan perubahan wacana tentang wilayah terluar menjadi wilayah terdepan negara. Perubahan ini membawa konsekuensi pengembangan dan pengelolaan baru yang merubah menjadi lingkungan baru.

Perubahanan lingkungan dalam beberapa fasa berpengaruh terhadap munculnya adaptasi adaptasi dari masyarakat local. Lingkungan baru membentuk tantangan-tantangan sekaligus peluang –peluang yang akan menentukan pola-pola tindakan pada masyarakat lokal. Pada beberapa kasus interaksi budaya terjadi proses-proses penyesuaian, yang seringkali terjadi adanya *lag* atau perbedaan yang mencolok dan signifikan dari dua pihak pemangku budaya atau lebih. Tidak jarang perbedaan ini menjadi awal terjadinya gegar budaya atau culture shock. Beberapa masyarakat budaya mereka melakukan upaya upaya strategis ketika dihadapkan pada situasi ini. Strategi adaptasi menjadi langkah solutif mereka.

Di kawasan Perbatasan Negara Indonesia-Timor Leste sejak tahun 2009 mulai terbentuk lingkungan baru perkotaan yang menyertai keterpisahan politik menjadi 2 negara. Pola-pola kehidupan moden terasakan sejak dilaksanakannya program percepatan pembangunan kawasan perbatasan 2014-2015 dan disertai terbentuknya lingkungan baru. Di sisi yang lain kawasan ini dihuni oleh kelompok masyarakat yang masih teguh pada tradisi dan mayoritas berada dalam tingkat kehidupan yang masih rendah. Masyarakat penghuni kawasan menjadi elemen penting yang terlibat langsung di dalam lingkungan baru tersebut. Situasi ini menjadikan gambaran yang kontradiktif, dan menimbulkan berbagai permasalahan bagaimana masyarakat mampu menjawab tantangan-tantang kehidupan baru menjadi peluang bagi pengembangan mereka?

---

\*Emel: danu\_damar@yahoo.co.id

Proses adaptasi seperti apa yang dilakukan dalam lingkungan baru? Serta bagaimana dampak terhadap nilai-nilai kehidupan sebagai masyarakat tradisi dalam lingkungan kehidupan kota di perbatasan Negara?

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk eksplorasi dan memahami makna sejumlah individu atau sekelompok orang yang intinya berupa masalah sosial atau kemanusiaan dan berusaha menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan yang didapatkan melalui cara pandangan induktif. Menurut Kaplan dan Maner dalam penelitian budaya dapat menggunakan pendekatan Emik dan Etik (Kaplan:2002). Pendekatan Emik dalam penelitian ini akan menghasilkan data lapangan yang didasarkan pada temuan-temuan langsung di lapangan menurut pandangan masyarakat setempat. Manakala untuk pendekatan Etik, pendekatan ini dilakukan dalam penelitian dengan melakukan pengkategorian fenomena budaya menurut peneliti dengan mengacu pada teori-teori yang berkaitan dengan perubahan budaya dan adaptasi budaya.

Pengumpulan data menggunakan metode observasi, pengamatan terlibat *participant Observation* (Jurgensen,1989). Pengumpulan data dilakukan melalui metode pengamatan/observasi, partisipasi terlibat, dan wawancara mendalam (*in depth*) terhadap informan. Teknik wawancara alam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dari Scale (Scale, 1999), yang meliputi ada tiga langkah kerja yaitu: (1) Mendengarkan cerita, teknik ini memberikan ruang pada informan untuk menceritakan pengalaman mereka sebagai pelaku yang berarada dalam tatanan sosial budaya patriarkhi. (2) Memperhatikan tingkah laku (*observing behavior*). Pengamatan terlibat memberikan informasi non oral yang dapat menguatkan terhadap testimoni dari para informan sebagai bahan cross-cek dan sebagai bahan data sikap dan tingkah laku. (3) Menguji jejak historis objek penelitian.

Analisis *Strategi adaptif budaya* dalam penelitian menggunakan Teori Strategi Adaptif Budaya dari Kim (Kim,2001: 153). Menurut Kim terdapat 2 tahap adaptasi yaitu *cultural adaptation* dan *cross cultural adaptation*. *Cultural adaptation* merupakan proses dasar komunikasi yaitu menyampaikan pesan, medium dan penerima pesan, sehingga terjadi encoding dan decoding. Proses ini didefinisikan sebagai tingkat perubahan yang terjadi ketika individu pindah ke lingkungan yang baru proses pengiriman pesan penduduk local di lingkungan baru tersebut yang dapat dipahami oleh kelompok terlibat.

## PEMBAHASAN

### Masyarakat Adat di Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Wilayah perbatasan NTT yang terbentang sebagian merupakan perbatasan darat yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste bahkan untuk wilayah TTU dan TTS membentuk wilayah enclave Oecusse Timor Leste. (BPPD Kabupaten TTU:2016). Wilayah wilayah tersebut terdiri dari sekitar 60 desa yang dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat adat (BPS 2014). Tercatat setidaknya ada 12 kelompok masyarakat adat di wilayah perbatasan Wini terdiri dari suku Meko, suku Kutet dan suku Kase, mereka tumbuh dalam ikatan tradisi yang kuat dalam pengaturan kehidupan. Menurut Parsudi Suparlan yang dikutip Anan Mutakin (200:1), masyarakat adat adalah suatu kesatuan kehidupan sosial manusia, menempati wilayah tertentu dengan keterarutan dalam kehidupan social tersebut telah dimungkinkan adanya seperangkat pranata sosial yang menjadi kebiasaan dalam kebudayaan yang mereka miliki bersama.

Dengan demikian masyarakat pemukim di lingkaran perbatasan berada dalam lingkungan sosial budaya yang dibangun oleh ikatan nilai adat untuk mengatur kehidupan mereka dan merupakan produk *local wisdom*. Tidak dapat dipungkiri secara politik masyarakat adat berada di dalam

ikatan sosiopolitik negara Indonesia.

Pada saat negara secara aktif melakukan upaya perubahan di perbatasan Wini dan menjadikan Wini sebagai Kawasan Ekonomi Khusus maka terbentuklah lingkungan baru yang hadapi oleh masyarakat-masyarakat adat tersebut. Tatanan lingkungan inilah menurut Lili weri dapat menjadi alasan dasar bagi terjadinya fenomena gegar budaya (culture shock) di beberapa masyarakat adat di NTT.

### **Perubahan lingkungan di Kawasan Perbatasan Indonesia**

Perubahan sosial sebagai konsep dapat dipahami dalam dua pengertian. Pengertian pertama dapat didefinisikan sebagai perubahan dalam struktur sosial, seperti jumlah penduduk, komposisi atau keseimbangan bagian-bagian penduduk. Kedua, transformasi sosial dapat diartikan sebagai proses-proses perubahan yang mencakup ekonomi, politik, dan budaya atau dengan kata lain konsep transformasi sosial dapat dipahami sebagai “*any alteration in structure*” (Burke, 1980: 80).

Di Wilayah perbatasan NTT ketika program Nawacita dilaksanakan akhir tahun 2015 dengan melakukan perubahan-perubahan besar maka muncul berbagai bentuk gegar budaya pada masyarakat adat di kawasan tersebut. Meskipun tidak muncul cultural konflik terbuka namun menjadi alasan bagi kelompok-kelompok masyarakat adat untuk melakukan upaya-upaya strategis menghadapi perubahan tersebut. Masyarakat adat masuk dalam arus putaran kemajuan yang digulirkan pemerintah. Kondisi culture shock akan menjadi gejala awal diikuti dengan adaptasi budaya. Pada tahap selanjutnya seseorang atau masyarakat akan mengambil momentum momentum keputusan untuk beradaptasi. Fenomena gegar budaya pada masyarakat adat terjadi ketika dihadapkan pada perubahan-perubahanlingkungan baru (Lili weri: 2004, 9-15).

Di pintu-pintu PLBN telah dilakukan pengembangan kawasan dengan menggunakan pendekatan security dan prosperity approach serta pendekatan lingkungan terutama lingkungan fisik. Namun ada hal yang penting namun masih belum tersentuh secara maksimal dalam pendekatan lingkungan yaitu pendekatan lingkungan dalam pengertian lingkungan sosial budaya. Hal ini menjadi penting karena kawasan perbatasan tidak hanya berbicara dalam dimensi ruang saja namun dalam dimensi manusia. Pemaknaan wilayah perbatasan di mana terdapat manusia dengan aktifitas yang menyertai dan pola-pola interaksi yang terbangun dengan lingkungan sosial budaya serta interaksi dan komunikasi yang terbangun dengan dimensi lingkungan fisik. Lingkungan sosial budaya akan membentuk adanya aktivitas-aktivitas masyarakat dengan identitas komunitas mereka serta komunikasi yang terbangun dengan lingkungan di sekitarnya. Dalam upaya membangun interaksi dan komunikasi dengan lingkungannya, maka dibutuhkan adanya pengelolaan serta strategi-strategi yang harus dilakukan untuk membentuk hubungan yang harmonis dalam pengembangan kawasan perbatasan.

Dalam hal ini masyarakat adat melakukan langkah-langkah adaptasi antara lain dengan mengaktifkan dan melakukan kerjasama elemen adat dengan elemen pemerintah. Upaya ini dilakukan dengan mengaktifkan organisasi sosial adat yang mempunyai sebagai alat komunikasi antara kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan masyarakat dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan negara. Elemen adat yang diaktifkan baik ketua adat serta pejabat di bawahnya yaitu Tobu. (wawancara: Usi Meko 2019).

Memberdayakan *local wisdom* dengan secara aktif dan menguatkan potensi-potensi sosial ekonomi yang dimiliki masyarakat adat untuk berkontribusi secara aktif dalam geliat ekonomi dan sosial. Upaya-upaya ini dengan tetap menjadikan dasar-dasar aturan adat untuk dapat dipertahankan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian di beberapa tingkatan. Upaya ini rupanya

mendapat respon yang positif dari pihak pemerintah dalam hal ini BNPP. BNPP melakukan pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan tanpa meninggalkan peranan aktif dari masyarakat. Dasar kebijakan untuk melibatkan masyarakat local tertuang dalam Pengelolaan kawasan pebatasan di Nusa Tenggara Timur dinyatakan dengan jelas dalam Peraturan presiden RI No. 179 th 2014 tentang pengelolaan tata ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pengelolaan Perbatasan Negara.

Sejak dicanangkan program nawacita ini secara bertahap terbentuk apa yang digambarkan oleh masyarakat di kawasan perbatasan sebagai dunia kota dan moden, idiom yang berkembang di masyarakat “kehidupan *kota ditengah masyarakat kumuh dan tertinggal.*” Munculnya wilayah perbatasan menjadi sentral aktifitas sosial dan ekonomi mampu membentuk pusat-pusat keramaian yang dampak cukup signifikan, paling tidak wilayah perbatasan dibentuk menjadi aktifitas mobilitas barang dan manusia. Sebagai contoh ketika pemerintah menetapkan wilayah perbatasan Wini dengan status Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Wini. Penetapan tersebut menunjang pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Wini dan menjadikan Wini tumbuh menjadi bentuk lingkungan baru dengan aktifitas ekonomi sebagai penggerak utamanya.

1. pemerintah membangun fasilitas publik di Wini seperti telah dibangun jalan raya dua jalur sejauh belasan kilometer;
2. pengembangan pelabuhan Wini dengan Bupati Belu untuk mendorong agar daerah perbatasan itu menjadi kawasan ekonomi khusus,
3. pembangunan sejumlah gudang-gudang penampung barang
4. rencana pembangunan bandar udara yang letaknya berada di perbatasan dua kabupaten Belu dan Wini yaitu di Kecamatan Biboki Anleu (TTU) dan Kakuluk Mesak (Belu) yang memiliki hamparan sejauh belasan kilometer.
5. Pembangunan pintu pas lintas batas
6. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi Telkomsel
7. Diadakannya Festival Crossborder Atambua menjadi agenda wajib yang didatangi para wisatawan, khususnya masyarakat Timor Leste mengenalkan Atambua sebagai salah satu bagian dari Indonesia dengan kekayaan alam serta budayanya yang indah nan eksotis sebagai bentuk Wisata Perbatasan

Dengan ditetapkannya Wini sebagai KEK secara langsung menjadikan kawasan ini menjadi lokus bagi munculnya pusat kegiatan dan terbentuk kawasan kota baru. Di NTT selain perbatasan di Kabupaten Kupang, kawasan “kota” perbatasan sudah terbentuk di Kawasan Perbatasan Pintu Montain yang menyatu dengan kawasan kota Atambua. Wilayah pintu perbatasan yang akan dikembangkan menjadi “kota perbatasan adalah Napan.

Pembangunan kota-kota di perbatasan telah dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Negara ini menjadikan kawasan perbatasan sebagai garda terdepan dengan penguatan dalam bidang sosial ekonomi, strategi yang dilakukan oleh Malaysia di Perbatasan Indonesia-Malaysia ternyata mampu menjadikan wilayah perbatasan Malaysia menjadi rujukan aktivitas ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia. Bahkan muncul idiom tentang “Garuda di Dadaku, Malaysia di Perutku.”

Langkah strategi pemerintah membentuk kawasan Ekonomi dan membentuk “Kota-kota di perbatasan sangat efektif untuk pemerataan kesejahteraan sosial, ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah-wilayah perbatasan Negara. Hadirnya negara dalam mengubah kawasan non strategis menjadi kawasan strategis ini memerlukan antisipasi secara aktif dari masyarakat lokal.

Pemanfaatan kawasan sebagai pusat aktifitas barang maupun manusia mengalami peningkatan yang signifikan. Data dari BPS, wisman yang berkunjung ke Indonesia melalui Pos Lintas Batas (PLB) periode Mei 2017 mencapai 156,05 ribu kunjungan, angka ini mengalami kenaikan sebesar 722,38 persen jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (BPS 2018).

Dibalik capaian –capai kemajuan di Pintu Perbatasan Wini terdapat beberapa masalah yang muncul di lingkungan masyarakat lokal. Permasalahan berakar pada perbedaan nilai-nilai baru dengan nilai-nilai budaya lokal. Persoalan tata nilai baru yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi lama antara lain: (1) Perubahan struktur birokrasi modern menggeser struktur birokrasi adat. Tata kelola birokrasi modern lebih mendominasi terutama yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan di PLB. Birokrasi tradisional pada akhirnya hanya berkembang ditingkat lokal di lingkungan masyarakat adat. Aturan aturan adat bersifat internal dalam lingkup anggota suku. Demikian juga peranan kepala adat menjadi terbatas dengan peranan-peranan dalam struktur kepemimpinan baru. (2) Keterbatasan sumber daya manusia di wilayah perbatasan wini menjadikan keterlibatan mereka dalam proses perubahan menjadi tidak maksimal. Masyarakat di kawasan Perbatasan tumbuh keterbatasan fasilitas pendidikan formal. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan sekolah sekolah yang sangat minim terutama untuk tingkat sekolah Menengah. Kondisi ini menjadikan masyarakat lokal tidak dapat secara maksimal mengambil peranan dalam di lingkungan mereka. (3) Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia dari masyarakat lokal mendorong kelompok-kelompok masyarakat pendatang untuk mengisi kekosongan tersebut, baik dalam tatanan birokrasi maupun pengambilan peranan strategis ekonomi. Munculnya kelompok-kelompok masyarakat baru mengancam terjadinya marginalisasi masyarakat lokal wilayah mereka sendiri. Munculnya kelompok –kelompok masyarakat baru sebagai produk masyarakat “kota” ditengah tengah alam pikiran masyarakat desa.

Persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat lokal di Perbatasan Wini menjadi gambaran yang tengah berjalan pada masyarakat “kota” di kawasan perbatasan negara Indonesia-Timor Leste PLB Wini. Meskipun demikian ada upaya-upaya dilakukan oleh masyarakat adat antara lain (1) penggiatan kembali fungsi adat sesuai dalam struktur organisasi adat. Masyarakat adat menggiatan kembali fungsi *Tobo* sebagai jabatan yang bertugas berkomunikasi dengan pihak pemerintah sehingga diharapkan menjadi sarana efektif aspirasi masyarakat. (2) membuka diri untuk melakukan penyesuaian dalam perubahan dengan tetap berpegang pada standard aturan yang masih dapat diterima oleh aturan adat.

## SIMPULAN

Pengembangan wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste PLB Wini mampu merubah wajah wilayah terluar negara menjadi lingkungan baru kota-kota di perbatasan negara. Kativitas ekonomi menjadi penggerak utama pembentukan kota yang disertai dengan perubahan-perubahan aspek sosial budaya. Masyarakat di perbatasan sebagai elemen penting yang terlibat langsung. Masyarakat lokal dihadapkan pada lingkungan yang baru yang berbeda dengan lingkungan lama mereka.

Lingkungan baru yang berbeda menimbulkan beberapa persoalan antara lain masalah ketergeseran nilai-nilai lama, tergantikannya peran dominan pejabat adat oleh peran baru dalam struktur organisasi dan birokrasi modern, serta globalisasi informasi dan peningkatan fasilitas pendukung lainnya membuka kelompok-kelompok baru pendatang mengisi kekurangan sumber daya manusia dan menjadi pemain –pemain baru dilingkungan perbatasan Wini.

Upaya keterlibatan masyarakat sudah dilakukan meskipun dalam perkembangannya masih belum maksimal. Penggiatan revitalisasi nilai adat ditujukan sebagai upaya internal untuk

memberikan dasar anggota masyarakat adat untuk tetap menggunakan nilai adat sebagai bagian dalam melakukan perubahan. Elamen adat juga berusaha melakukan komunikasi dengan pemeritan serta kelompok kepentingan sebagai upaya secara aktif mengambil peran dalam proses pengembangan wilayah perbatasan.

## RUJUKAN

- Alo, Lili Weri. (2004). *Komunikasi Antar Budaya*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Burke, Peter. (1980). *History and Socioal Theory*, Ithaca New York: Cornel University Press.
- Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. (2018). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2018*, Kefamenanu TTU: Pemerintah Kabupaten TTU.
- Danny L. Jurgensen. (1989). *Participant Observation, A Methodology for Human Studies*. Applied Social Research Methods Series Volume 15 (Newbury Park, London, New Delhi: Sage Publications.
- Eni Sugiarti. (2016). *Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat di Perbatasan Indonesia Timor Leste: Pasar Tradisional Bersama di Perbatasan Timot Tengah Utara – Oecusse Timor Leste dan Mobilitas Masyarakat*, Laporan Penelitian PUPT tahun 2015
- Irfan Setiawan, " Sebuah Asa di desa perbatsana NKRI "dalam *Jurnal ilmu Pemerintahan, Suara Khatulistiwa vol I no 2 Desember 2016*
- Kim, Young Yun. (2001). *Becoming Intercultural: An Integrative Teori and Cross Cultural Adaptation USA*: Sage Publication.
- Lusia Savitri Setyo Utami, "Teori-Teori Adaptasi antar Budaya," dalam *Jurnal Komunikasi, Universitas Taruma Negara, Vol.7 no 2 Juli 2015*.
- Persudi Suparlan. (2004). *Hubungan Antar Suku Bangsa, Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan*, Jakarta: YPKIk.